



LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2024

INDEPENDENSI – INTEGRITAS – PROFESIONALISME

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah system pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tersebut diperbarui dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2020-2024. Output dari proses pengukuran kinerja BPK adalah LAKIN Eselon II, LAKIN Eselon I dan LAKIN BPK.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai Pasal 658 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berada di bawah Ditjen PKN V dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang kepala. Ditjen PKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Penyelenggara Haji, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Sumatera.

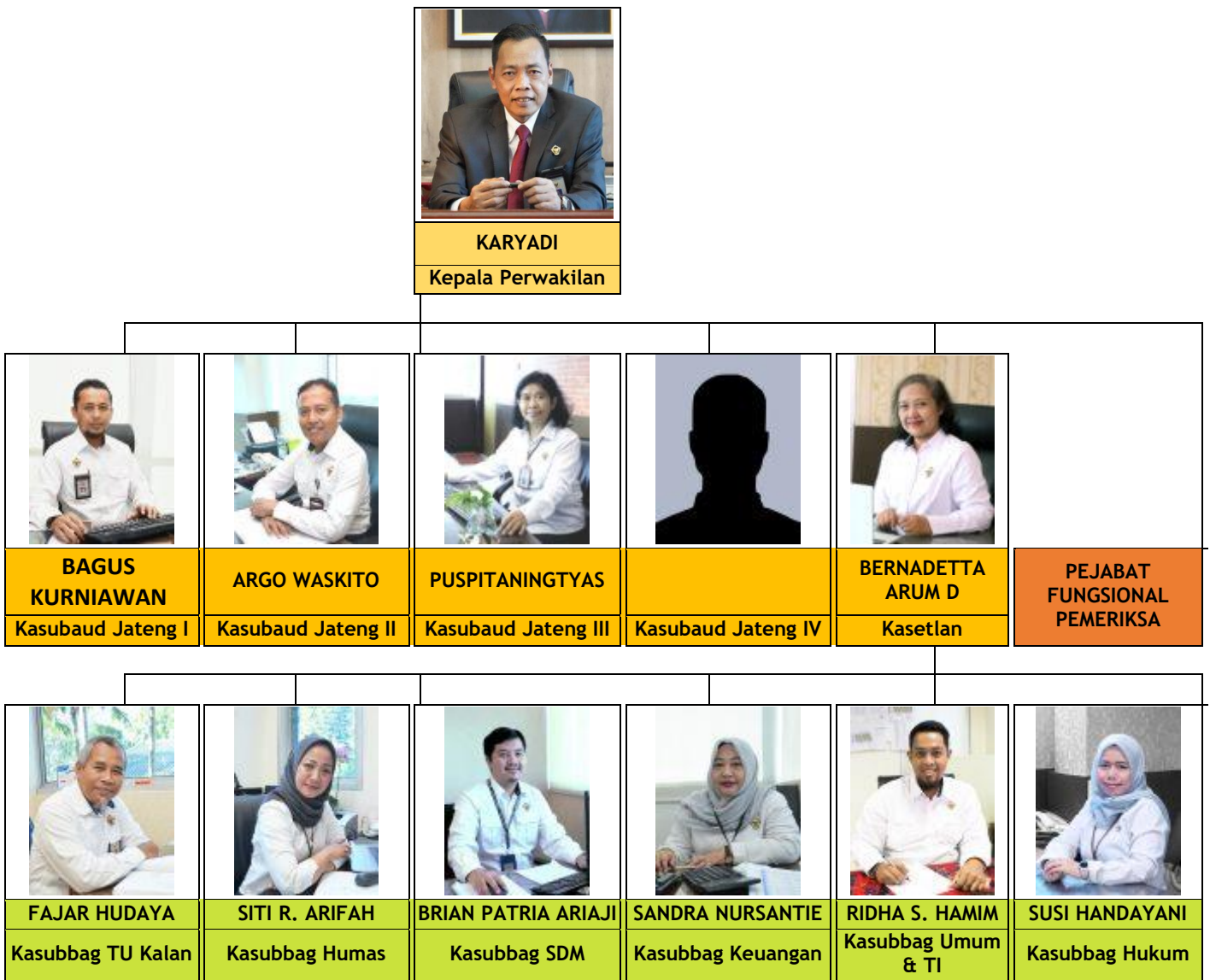
Dalam pelaksanaan tugasnya, Ditjen PKN V didukung antara lain oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Ditjen PKN V, khususnya tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh Ditjen PKN. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKN V antara lain dengan merumuskan rencana aksi, kegiatan, dan kebijakan pemeriksaan di Provinsi Jawa Tengah, menyusun program, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menetapkan tim pemeriksa, memperoleh keyakinan mutu hasil

pemeriksaan, mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta mengelola sumber daya manusia, keuangan, hokum, hubungan masyarakat, teknologi informasi sarana dan prasarana, dan administrasi umum di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Perwakilan dan juga mengoperasikan Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA) untuk memantau kinerja Perwakilan dan memberikan kontribusi serta dukungan pada akuntabilitas kinerja BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 - Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Tugas dan lingkup kerja masing-masing Eselon III disajikan dalam tabel berikut:



Gambar 1.2- Penjabaran tugas dan lingkup Eselon III

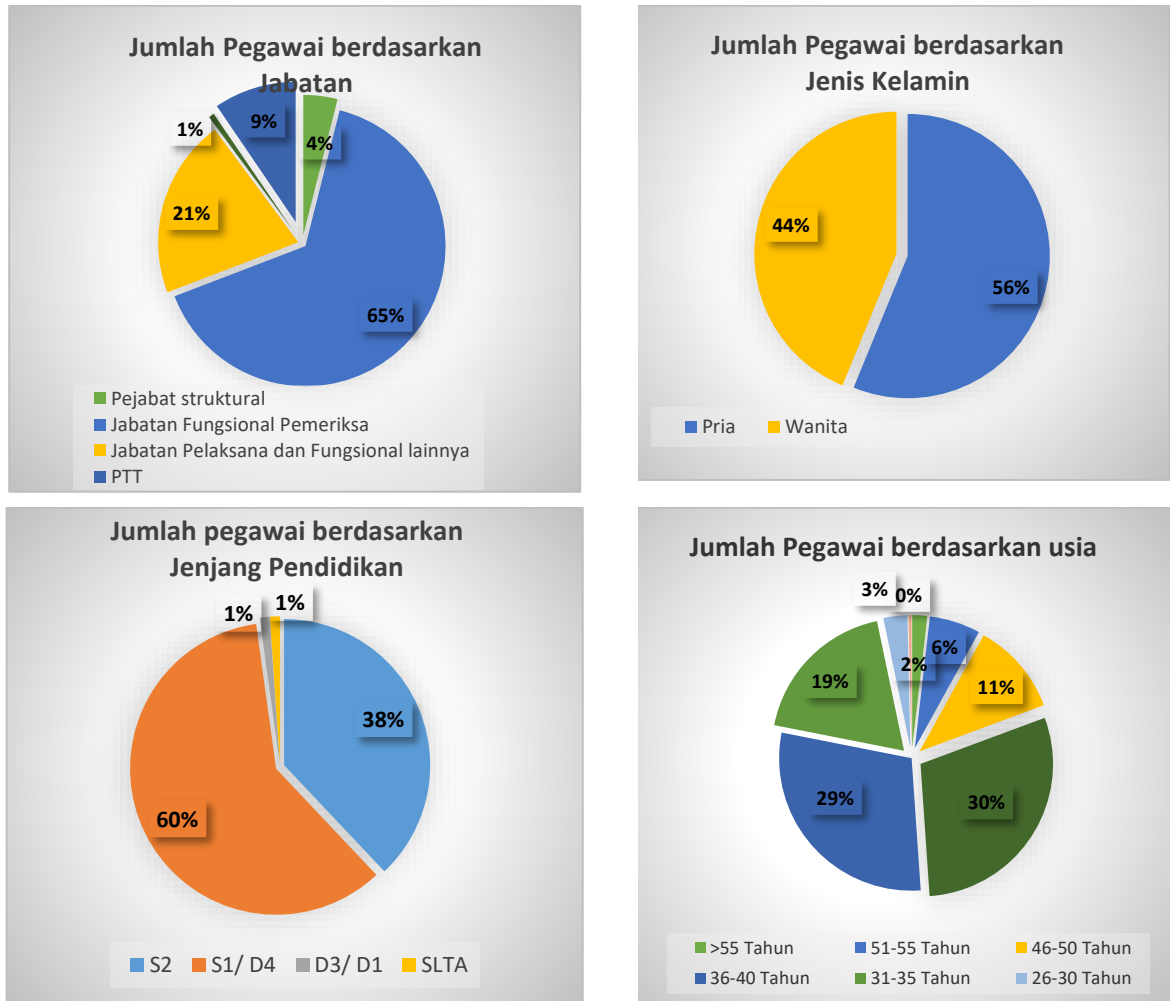
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2024 berjumlah 304 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 273 Pegawai Tetap, terdiri dari 11 Pejabat Struktural, 199 Pejabat Fungsional Pemeriksa dan 63 staf dengan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lainnya;
- b. 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. 29 Pegawai Tidak Tetap.

Secara ringkas komposisi pegawai disajikan dalam gambar 1.3 berikut:



Gambar 1.3- Komposisi Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

2. Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp52.916.734.000 dengan target 646 output.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Isu strategis tersebut diwujudkan dalam pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

 - a. Pemeriksaan Kinerja Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Bencana pada dua entitas pemeriksaan;
 - b. Pemeriksaan Kinerja Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah pada dua entitas pemeriksaan;
 - c. Pemeriksaan Kinerja Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kemiskinan pada dua entitas pemeriksaan;

- d. Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu 2024 pada satu entitas; dan
 - e. Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur pada sepuluh entitas.
2. Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
 Sesuai GUID 5270-*Guideline for the Audit of Corruption Prevention*, program antikorupsi utamanya berfokus pada 3 elemen utama yakni pencegahan (*prevention*), deteksi (*detection*), dan reaksi (*reaction*). Adapun peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi ini dapat dibagi menjadi empat kegiatan yaitu:

Dilaksanakan oleh Ditjen PKN / Perwakilan	Dilaksanakan oleh Ditjen Pemeriksaan Investigasi
<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan b. Pendeteksian 	<ul style="list-style-type: none"> c. Investigasi d. Dukungan Litigasi

Untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut di atas, BPK perlu menyusun Inisiatif Strategis (IS) “Peningkatan Peran BPK dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Pengembangan Strategi Pencegahan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara”. Proses perumusan IS ini mendasarkan pada Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 serta Arah Kebijakan BPK yaitu arah kebijakan pertama “peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan”, pada Strategi 2 yaitu “meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”. Pengampu IS ini adalah AUI namun dalam pelaksanaan IS ini diperlukan sinergi dan kerja sama dengan seluruh unit kerja lain di BPK baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan.

Salah satu aktivitas IS 2.2 adalah penguatan Sistem Pencegahan Korupsi di Entitas yang terdiri dari kegiatan Reviu Sistem Pencegahan Korupsi di entitas melalui Pemeriksaan Non Investigatif, Pemeriksaan Kinerja Strategi Nasional dan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK dan AN PK), Pemberian pendapat atas Kebijakan Nasional Pemberantasan Korupsi, dan Fraud Awareness Training bagi entitas. Kegiatan reviu sistem dan pemeriksaan kinerja Stranas PK dan AN PK dilaksanakan melalui pemeriksaan tematik BPK tahun 2022 yang dikelompokkan pada pemeriksaan tematik Prioritas Nasional (PN) 7 khususnya Program Prioritas (PP) 3 Penegakan Hukum Nasional. Pemeriksaan tematik yang dilaksanakan adalah ***pemeriksaan efektivitas sistem pencegahan korupsi dan Stranas PK***.

BAB II PERENCANAAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Perencanaan Strategis

BPK mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyesuaikan periode Renstra BPK 2020-2024 dengan perencanaan RPJMN 2020-2024 di mana pada periode Renstra sebelumnya memiliki tenggat waktu satu tahun dengan periode RPJMN. Kebijakan penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyusunan Renstra BPK 2020-2024 di samping menyelaraskan periode dengan agenda pemerintah juga dituntut untuk selalu tanggap dan responsif atas isu-isu aktual. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, reviu internal dan validasi data capaian kinerja. Data realisasi capaian atas target IKU diinput oleh inputer masing-masing satker secara periodik, yang telah direviu oleh masing-masing manajer dan pimpinan satker. Adapun validasi data capaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat PSMK atas aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan dan akurasi data. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan membandingkan capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja. Sejak Tahun 2018, pelaksanaan pengukuran kinerja menggunakan Aplikasi PRISMA yang dikembangkan Direktorat PSMK bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi.

B. Target Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.



Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat PSMK dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024. Indikator kinerja dan target kinerja ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I, dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V.

Untuk lebih jelasnya, berikut Peta Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024:



Gambar 2.2 Peta Strategis Tahun 2024

Untuk mengukur keberhasilan Renstra BPK Tahun 2020-2024, BPK menggunakan suatu Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) yang merupakan sistem manajemen kinerja yang bekerja secara online serta berfungsi untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengukur pencapaian kinerja dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, sejak Tahun 2018, aplikasi yang digunakan untuk implementasi SIMAK adalah Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA).

Siklus Pengukuran Kinerja Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, reviu internal, dan validasi data capaian kinerja. Data realisasi capaian atas target IKU diinput oleh inputer masing-masing satker secara periodik. Data yang diinput tersebut adalah data yang telah direviu oleh masing-masing manajer dan pimpinan satker.

Adapun validasi data capaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat PSMK atas aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan dan akurasi data. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan memperbandingkan capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja.

Tabel 2.1
INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan , Sasaran dan Anggaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2024
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Rp51.865.983.000	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		IKU 3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%

Sasaran Kegiatan , Sasaran dan Anggaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2024
Sasaran: • Meningkatkan Pemeriksaan berkualitas • Meningkatkan layanan pemeriksaan		IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)
		IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (90,05)
		IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
		IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%

2. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja 2024

Rencana Aksi menyajikan aktivitas utama per triwulan dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dokumen rencana aksi unit kerja. Pada bagian ini dijelaskan secara umum atas pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian setiap indikator kinerja yang diampu oleh unit kerja. Rencana Aksi secara detail sebagai berikut:

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Tahun : 2024

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	Januari dan Februari : • Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP yg terdiri dari Ketua Tim, Pengendali Tim dan Penanggung Jawab) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP yang terdiri dari Kepala Subbauditorat dan Kepala Perwakilan selaku Pemberi Tugas) Maret s.d. Mei : • Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I Juni : • Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terjinci LKPD atas 36 entitas Juli dan Agustus : • Perencanaan pemeriksaan disusun secara akurat dan lebih awal • Penyusunan tim disusun lebih awal dan matang September s.d Desember :

Laporan Kinerja Tahun 2024 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP yg terdiri dari Ketua Tim, Pengendali Tim dan Penanggung Jawab) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP yang terdiri dari Kepala Subbauditorat dan Kepala Perwakilan selaku Pemberi Tugas) Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester II Pemenuhan QA dan QC pada pelaksanaan pemeriksaan Semester II
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Januari dan Februari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Tahun 2024 <p>Maret :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 <p>April s.d Juni : -</p> <p>Juli dan Agustus :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 <p>September dan Oktober : -</p> <p>November dan Desember :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mereview kesesuaian Simpulan dalam Konsep LHP Kinerja dan DTT dengan Harapan Penugasan
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	<p>Januari s.d Mei :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL Kegiatan verifikasi dan validasi dokumen tindak lanjut melalui SIPTL Verifikasi dan validasi tindak lanjut atas penyelesaian tindak lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya ked alam status Telah Selesai (TS) <p>Juni :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP yg terdiri dari Ketua Tim, Pengendali Tim dan Penanggung Jawab) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP yang terdiri dari Kepala Subbauditorat dan Kepala Perwakilan selaku Pemberi Tugas) Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester II Pemenuhan QA dan QC pada pelaksanaan pemeriksaan Semester II
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Januari dan Februari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Tahun 2024 <p>Maret :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 <p>April s.d Juni : -</p> <p>Juli dan Agustus :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 <p>September dan Oktober : -</p> <p>November dan Desember :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mereview kesesuaian Simpulan dalam Konsep LHP Kinerja dan DTT dengan Harapan Penugasan
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	<p>Januari s.d Mei :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL Kegiatan verifikasi dan validasi dokumen tindak lanjut melalui SIPTL Verifikasi dan validasi tindak lanjut atas penyelesaian tindak lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya ked alam status Telah Selesai (TS) <p>Juni :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I

Laporan Kinerja Tahun 2024 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
							Oktober s.d Desember : <ul style="list-style-type: none"> Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan oleh Badan jika terdapat permintaan dari pemangku kepentingan 	
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	50%	50%	Desember	Januari s.d Juni : - Juli s.d September: <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional Koordinasi terkait tema pemeriksaan tematik nasional dalam rangka persiapan pemeriksaan Menyusun tim pemeriksaan tematik nasional Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan tematik nasional Oktober s.d Desember : <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pemeriksaan terinci tematik nasional
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)	-	-	-	Sangat Memuaskan (4,81)	Desember	Januari s.d Maret : <ul style="list-style-type: none"> Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksa pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksa LKPD Sosialisasi atas Visi, Misi dan Nilai Dasar serta Kode Etik dalam Penerimaan Pimpinan maupun rapat - rapat yang dilaksanakan Fakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP April sd Juni : - Juli s.d September : Menginformasikan dan monitoring responden untuk mengisi kuesioner terkait implementasi nilai dasar BPK Oktober s.d Desember : -
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)	-	-	-	AA (90,05)	Desember	Januari s.d Maret : <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Aksi pencapaian kinerja tahun 2024 Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
							April s.d Juni : <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan menacu pada aturan berlaku Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi Juli s.d September : <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan menacu pada aturan berlaku Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II dan Rencana Aksi pencapaian kinerja berdasar hasil evaluasi Oktober s.d Desember : <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan menacu pada aturan berlaku Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III dan Rencana Aksi pencapaian kinerja berdasar hasil evaluasi Penyusunan LAKIN Tahun 2024 	
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	28%	65%	75%	98%	Desember	Januari s.d, Desember : <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi peraturan (JASMDN), Update SISDM, SiAP, LK, SiAP, Bapparel, SMP Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan Melakukan monitoring setiap triwulan
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%	37,5%	50%	100%	Desember	Januari s.d Maret : <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Penerapan Best Practice Tahun 2023 Inventarisir usulan Best Practice di Perwakilan Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan : 1. Diklat persiapan Pemeriksaan IKPD, TA 2023 2. Wawancara berbasis Pengetahuan : Tugas Pokok dan Fungsi Resepsionis di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah April s.d Juni : <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Blogging) Juli s.d September : <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (In House Training)

Laporan Kinerja Tahun 2024 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)					
		TW I		TW II		TW III		TW IV								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)				
												Oktober s.d Desember : • Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (In House Training)				
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Januari s.d Desember : • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit				
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	5%	10%	15%	20%	25%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Desember	Januari : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan topik penneimbangan kompetensi pegawai Februari s.d Desember : • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan topik penneimbangan kompetensi pegawai • Pegawai mendaftar diklat secara mandiri, sesuai dengan jadwal diklat yang ditawarkan pada aplikasi Sisdiklat bpk.go.id • Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun)
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	Desember	Januari : • Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2022 dan Kebijakan TA. 2022 • Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran • Menyusun data capaian output Februari s.d Juni : • Monitoring dan menyusun data capaian output dan realisasi anggaran Juli : • Melakukan rapat evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023 Semester I • Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran			

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)	
		TW I		TW II		TW III		TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)
												• Menyusun data capaian output. Agustus s.d November : • Monitoring dan menyusun data capaian output dan realisasi anggaran Desember : • Melakukan rapat evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023 Semester II • Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran • Menyusun data capaian output.

Keterangan:

Kolom (1)	:	Ditisi dengan nomor urut IKU Unit Satuan Kerja
Kolom (2)	:	Ditisi dengan nomenklatur IKU Unit Satuan Kerja
Kolom (3)	:	Ditisi dengan Target Tahun 2024
Kolom (4) s.d. (7)	:	Ditisi dengan target maksimal setiap trisulan dengan memperhatikan proses bisnis, Unit Satuan Kerja, target tahunan, dan karakteristik masing-masing indikator kinerja.
Kolom (8)	:	Ditisi dengan rencana waktu penyelesaian
Kolom (9)	:	Ditisi dengan rencana kegiatan aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja. Rencana kegiatan merupakan langkah-langkah dari unit/satuan kerja yang disusun secara rinci dan lengkap pada trisulan I, II, III dan IV sehingga dapat menggambarkan upaya Unit/Satuan Kerja dalam mencapai target indikator kinerja (kolom 5). Unit/Satuan kerja diharapkan dapat menggambarkan upaya-upaya yang akan dilakukan melalui rencana kegiatannya tersebut agar pada akhir tahun pencapaian kinerja dapat tercapai. Catatan: Khusus untuk IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, mohon mencantumkan jenis Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang akan dilaksanakan setiap trisulan (minimal empat jenis aktivitas manajemen pengetahuan yang berbeda selama Tahun 2024).

Gambar 2.3 Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Komponen AKIP yang di evaluasi salah satunya adalah LAKIN yang merupakan Laporan yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Dari hasil reuiu selama 3 tahun terakhir, diketahui terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja diantaranya terkait BPK yang telah memiliki ukuran kinerja individu yang mengacu kepada indikator kinerja satuan kerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai-Indikator Kinerja Individu (SKP-IKI), yang telah diterapkan juga oleh Perwakilan Jawa Tengah.

Perwakilan Jawa Tengah juga senantiasa berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan, di antaranya:




1. Melakukan analisis permasalahan pada hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya;
2. Menjaga komitmen dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja depan untuk mencapai/ mempertahankan target IKU;
3. Komunikasi intensif dengan Itjen terkait hal-hal yang memerlukan perbaikan.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengelolaan kinerja BPK dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran atas capaian target yang telah ditetapkan tersebut dilakukan secara berkala melalui Aplikasi PRISMA meliputi proses penginputan, validasi, dan reuiu data input.

Pengukuran capaian indikator ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip *self assessment* dimana data realisasi kinerja diinput oleh masing-masing satker ke dalam Aplikasi PRISMA
2. Terdapat tiga jenis polarisasi indikator (ekspektasi nilai realisasi indikator terhadap nilai targetnya) yaitu:
 - a. *maximize* - nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target;
 - b. *minimize* - nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target;
 - c. *stabilize* - nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu
3. Capaian indikator ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan *range* sebagai berikut:

Color Range	Deskripsi
	Skor \geq 100
	$80 \geq$ Skor $<$ 100
	Skor $<$ 80

4. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan manual pengukuran yang memuat mengenai definisi, tujuan, formula, bobot, satuan pengukuran, dan polarisasi masing-masing indikator beserta sumber data bukti pendukung dan penanggung jawab atas indikator

- Validitas data kinerja mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data, dan keakuratan data.

Selama tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:

Kegiatan Pemeriksaan:

- Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci atas seluruh LKPD di wilayah Provinsi Jawa Tengah TA 2023 ;
- Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 s.d Semester I Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pengelolaan APBD dalam rangka Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan TA 2022 s.d. Semester I 2024 pada Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Boyolali;
- Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional TA 2023 s.d. 2024 Semester I pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Pemeriksaan Kinerja atas Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kemiskinan pada Kabupaten Sragen, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Brebes;
- Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Dampak Bencana pada Kab Kendal;
- Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 (s.d 30 September) pada Pemerintah Kota Semarang dan Instansi Terkait Lainnya;
- Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kudus, Karanganyar, Blora, Magelang, Tegal, Banjarnegara dan Banyumas; dan
- Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Adhyatma MPH, RSUD Dr. Moewardi, dan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Instansi Terkait Lainnya di Semarang, Surakarta, dan Purwokerto.

Kegiatan Non Pemeriksaan:

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap kegiatan perkantoran;
- Penerapan manajemen pengetahuan;
- Pemenuhan jam diklat sebagai pengembangan kompetensi; dan
- Pemanfaatan kinerja atas Implementasi Anggaran.

Skor capaian kinerja selama lima tahun terakhir menunjukkan tren sebagai berikut:



Gambar 3.1 Capaian Kinerja selama Lima Tahun terakhir

Capaian kinerja atas ketiga belas indikator secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA PERWAKILAN JAWA TENGAH
TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Indikator Kinerja IKU		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Skor kinerja
	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	96,33%	96,33
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00	
IKU 3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	94,75%	105,00	
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,03%	101,03	
Sasaran: Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas Meningkatnya layanan pemeriksaan Meningkatnya	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,00
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101,20%	101,20
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,81	4,93	102,49
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	90,05	90,50	100,50
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	94,81%	96,74
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	103,72%	103,72
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,18	105,00
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100,00
	IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%	92,47%	105,00
SKOR KINERJA				101,25	

Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan realisasi tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	96,33%	95,67%	98,11%
	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00%	100%
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	94,75%	94,18%	92,47%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,03%	101,25%	102,01%

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,00%	100,13%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101,20%	103,47%	101,11%
Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas Meningkatnya layanan pemeriksaan Meningkatnya	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,81	4,93	4,68	4,84
	Hasil Evaluasi AKIP	90,05	90,50	91,40	90,14
	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	94,81%	98,31%	96,21%
	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	103,72%	102,14%	101,43%
	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,18	4,17	4,26
	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100,00%	100,00%
	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%	92,47%	91,07%	90,62%

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan Target Lima Tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	96,33%	96,33%
2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	94,75%	126,33%
4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	101,03%	101,03%

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	101,20%	101,20%
7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	4,81*)	4,93	102,49%
8.	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	87,00	88,00	89,00	90,05	90,50	100,50%
9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	98%*)	94,81%	96,74%
10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	103,72%	103,72%
11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,18	105,00%
12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
13.	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	84,5%*)	92,47%	105,00%

*) IKU 7 dan IKU 9 terdapat perubahan target karena hasil evaluasi IKU

**) IKU 13 terdapat perubahan target akibat perubahan metode pengukuran

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada dua tingkatan yaitu:

1. hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC)
2. hasil evaluasi EPP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan

Tabel 3.4 Capaian IKU 1

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	78,47%	86,22%	98,11%	95,67%	96,33%
Skor kinerja	78,47	86,22	98,11	95,67	96,33
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	78,47%	86,22%	98,11%	95,67%	96,33%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan sampai dengan Triwulan IV tidak dapat mencapai target yaitu sebesar 96,33% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Meski demikian, IKU ini telah mengalami peningkatan 0,66% dari tahun sebelumnya.

Penyebab target ini tidak tercapai karena hasil evaluasi EPP untuk tingkat konsistensi atas LHP hanya mencapai 88,89% dan tingkat akurasi atas LHP sebesar 97,22%, sehingga hasil akhir evaluasi EPP atas LHP yang diterbitkan belum memenuhi 100%.

Atas permasalahan ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan kualitas LHP dengan cara mengoptimalkan pemenuhan QA dan QC pemeriksaan secara berjenjang;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). Aplikasi SiAP ini digunakan untuk mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses reviu secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan DTT yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT.

Tabel 3.5 Capaian IKU 2

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100%	100%	100%	100%
Skor kinerja	100	100	100	100	100
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan telah memenuhi target sebesar 100%. Target tersebut tercapai karena adanya komitmen untuk menjaga kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan. Hal ini membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh unsur dari Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dalam memenuhi tujuan dan simpulan pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan serta Harapan Penugasan.

Peran unsur-unsur tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar LHP BPK mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk kepentingan publik yang dilaksanakan secara efektif, ekonomis dan efisien.

Di masa yang akan datang, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga berkomitmen untuk menjaga agar harapan pemeriksaan dapat terwujud sepenuhnya dan memberikan manfaat yang baik bagi entitas pemeriksaan dengan cara mengadakan pelatihan berupa *in-house training*, *knowledge transfer forum*, atau rapat-rapat pengarahan antara manajemen dengan para pemeriksa sehingga dapat terwujud sinergi dalam menjaga komitmen.

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada auditee sejak tahun 2005.

Tabel 3.6 Capaian IKU 3

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi *)	85,78%	87,71%	92,47%	94,18%	94,75%
Skor kinerja	105	105	105	105	105
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	114,37%	116,95%	123,29%	125,57	126,33%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU 3 pada Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 94,75%, lebih besar dari target yang ditetapkan (75%), sehingga mendapat skor sebesar 105. Realisasi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,57%. Hal ini mengindikasikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat.

Secara rinci, penghitungan persentase atas IKU 3 sebagai berikut:

Formula = ((a + d) / e) x 100%	
3.1. Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (a)	30.305
3.2. Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti (b)	1.669
3.3. Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti (c)	11
3.4. Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (d)	45
3.5. Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee (e)	32.030
Realisasi IKU 3 =	((a+d)/e) x 100%
	94,75%

Ketercapaian target ini didukung oleh komitmen dan peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan para *stakeholder* untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta tingkat pemanfaatan teknologi informasi dhi. aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Untuk mempertahankan capaiannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan senantiasa berupaya untuk:

1. Mengupayakan langkah-langkah strategis dan simultan dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
2. Memberikan rekomendasi pemeriksaan yang tepat sasaran dan tidak menyulitkan entitas pemeriksaan dalam menindaklanjuti.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melalui dosir-dosir entitas senantiasa menjalin komunikasi yang baik dan mendorong Inspektorat (selaku *counterpart*) untuk selalu memperbarui data tindak lanjut pada SIPTL.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Sumber data yang digunakan untuk pengukuran IKU ini adalah LHP Pemeriksaan Tematik dan RKP Pemeriksaan.

Perkembangan capaian IKU 4 dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian IKU 4

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	101,52%	100,88%	102,01%	101,25%	101,03%
Skor kinerja	101,52	100,88	102,01	101,25	101,03
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	101,52%	100,88%	102,01%	101,25%	101,03%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,22% jika dibandingkan tahun 2023, namun masih melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 101,03%. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen untuk senantiasa berupaya mendukung pemeriksaan berdasarkan isu strategis, RPJMN/D, dan SDGs.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mewujudkan dukungan atas pemeriksaan tematik nasional dengan merencanakan pemeriksaan yang mengacu pada RPJMN/D, isu strategis, dan perkembangan pembangunan terkini di Wilayah Jawa Tengah. Adapun pemeriksaan yang telah dilaksanakan:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sragen,
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Brebes,
3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen,
4. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana pada Pemerintah Kabupaten Kendal
5. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Aset Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Adhyatma MPH, RSUD Dr. Moewardi dan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo TA 2024 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Instansi terkait lainnya di Semarang, Surakarta dan Purwokerto

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tetap berkomitmen untuk mendukung pemeriksaan tematik nasional dan merencanakan pemeriksaan yang mampu menjawab isu strategis, sesuai dengan RPJMD Jawa Tengah dan program pemerintah lainnya.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan

IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Sumber data yang digunakan sebagai pengukuran yaitu Surat Permintaan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan, Surat Tugas Pemeriksaan, LHP, dan Surat Keluar Penyampaian LHP.

Tabel 3.8 Capaian IKU 5

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100,29%	100,13%	100%	100%
Skor kinerja	100	100,29	100,13	100,00	100,00
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100,29%	100,13%	100%	100%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan pada tahun 2024 tercapai 100% dari target yang ditetapkan.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah senantiasa berkomitmen untuk memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Selain itu, terdapat upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan cara mengelola permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan khususnya terkait permintaan Investigasi dalam satu Unit Kerja Eselon I yaitu Ditjen Pemeriksaan Investigasi.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's dengan sumber data pengukuran LHP Pemeriksaan Tematik dan RKP Pemeriksaan.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

Perkembangan capaian IKU 6 selama lima tahun terakhir tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Capaian IKU 6

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100,99%	101,11%	103,47%	101,20%
Skor kinerja	100	100,99	101,11	103,47	101,20
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100,99%	101,11%	103,47%	101,20%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah terealisasi 101,20% dari target yang ditetapkan. Realisasi ini menurun 2,27% jika dibandingkan tahun 2023 namun tetap melampaui target kinerja di tahun 2024.

Pencapaian target ini terjadi karena BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pemeriksaan yang sesuai dengan RPJMD dan perkembangan pembangunan daerah. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Boyolali di Boyolali dan Instansi Terkait Lainnya;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d Semester I 2024 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang dan Instansi Terkait Lainnya;
3. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Rembang di Rembang dan Instansi Terkait Lainnya; dan
4. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Instansi Terkait Lainnya di Wonosobo.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah senantiasa berkomitmen untuk merencanakan pemeriksaan yang dapat menjawab isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK yang dilakukan melalui survei.

Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Perkembangan capaian IKU dalam lima tahun terakhir tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Capaian IKU 7

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	4,81 **)
Realisasi *)	4,59	4,43	4,84	4,68	4,93
Skor kinerja	91,80	88,60	96,80	93,60	102,49
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	95,43%	92,10%	96,80%	93,60%	102,49%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

***) Perubahan target tahun 2024 karena adanya hasil evaluasi IKU

Berdasarkan hasil survei, realisasi atas IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK memperoleh nilai 4,93, dengan skor sebesar 102,49%. Hasil survei ini meningkat 0,25% dibandingkan tahun 2023.

Target ini tercapai karena adanya peningkatan pemahaman pegawai terhadap nilai dasar BPK dan keterlibatan aktif pegawai dalam pengisian survei tersebut. BPK Perwakilan Jawa Tengah juga berkomitmen meningkatkan pencapaian target, sehingga nilai-nilai dasar BPK menjadi budaya kerja yang terus diterapkan oleh para pegawai, di antaranya dengan cara:

1. Mengadakan sosialisasi tentang implementasi nilai dasar BPK;
2. Meningkatkan pengawasan implementasi nilai dasar kepada seluruh pegawai dan pimpinan di BPK;
3. Memberikan *reward* dan *punishment* secara adil terhadap pelaksanaan implementasi nilai dasar;
4. Memberikan pendampingan penerapan implementasi nilai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan secara konsisten dan berkesinambungan;
5. Mengingatkan pegawai agar mengisi survey dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
6. Telah melaksanakan Workshop Penegakan Integritas di awal tahun 2024.

Pada IKU 7 ini terdapat upaya efisiensi yang dilakukan, yaitu perubahan metodologi survei yang semula berbasis manual menjadi *digital*. Dengan adanya perubahan ini terjadi efisiensi bagi internal BPK dan pihak *surveyor*. Perubahan ini bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif, dan hasil survei *real time*. Sedangkan manfaat bagi pihak *surveyor* berupa efisiensi tenaga *surveyor*, pengolahan data survei lebih cepat, dan pemantauan pelaksanaan survei *real time*.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) ke seluruh Satuan Kerja di BPK

IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Sumber data pengukuran yang digunakan adalah hasil evaluasi AKIP dari Itjen. Secara rinci, perkembangan capaian IKU-8 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Capaian IKU 8

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	86,00	86,00	88,00	89,00	90,05
Realisasi *)	92,24	86,01	90,14	91,40	90,50
Skor kinerja	105	98,86	102,43	102,70	100,50
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	102,43%	95,51%	100,10%	101,50%	100,50%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki aktivitas kegiatan yang beragam. Atas hal tersebut, Inspektorat Jenderal (Itjen) melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah agar output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP pada tahun 2024 mencapai target sebesar 90,50 (skor 100,50%). Namun sesuai hasil evaluasi Mandiri yang telah divalidasi oleh Itjen, realisasi tersebut turun 0,90 dari tahun 2023. Penurunan capaian ini di antaranya karena pada LAKIN tidak dijelaskan kendala/penyebab target IKU tidak tercapai dan belum adanya penjelasan tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja. Meskipun demikian, realisasi masih dalam target yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan hasil evaluasi AKIP di tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah senantiasa berupaya:

1. Meningkatkan kualitas LAKIN dengan memperhatikan petunjuk penyusunan LAKIN dan memperbaiki kesalahan pada periode sebelumnya;
2. Menindaklanjuti rekomendasi Itama; dan
3. Menambah inovasi untuk mendukung SAKIP di BPK.

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

IKU ini diukur berdasarkan pemanfaatan layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN) dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiPTL, dan SiAP).

Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh unit kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

1. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM (20%) diukur dari pembaruan data (*updating*) data masing-masing pegawai dalam satu unit kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai;
2. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN (15%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas surat masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Eselon IV dalam satu unit kerja;
3. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP (20%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SMP dalam satu unit kerja Pemeriksaan;
4. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP (20%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SiAP untuk setiap Tim Pemeriksa dalam satu unit kerja;
5. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL (25%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SiPTL dan tingkat validasi level satuan kerja atas data tindak lanjut yang diinput entitas.

Perkembangan IKU-9 selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.12 Capaian IKU 9

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	98% **)
Realisasi *)	99,18%	99,18%	96,21%	98,31%	94,81%
Skor kinerja	104,39	103,31	99,19	100,32	96,74
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	101,20%	101,20%	99,19%	100,32%	96,74%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

***) Perubahan target tahun 2024 karena adanya hasil evaluasi IKU

Realisasi IKU 9 pada tahun 2024 tercapai sebesar 96,74% atau tidak memenuhi target sebesar 98%. Pencapaian tahun ini pun menurun 3,50% jika dibandingkan tahun 2023. Nilai ini secara rinci dapat dijelaskan pada formulasi berikut:

Formula		
$(20\% \times a) + (15\% \times b) + (20\% \times c) + (20\% \times d) + (25\% \times e)$		
a. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM	=	100,00%
b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN	=	96,22%
c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP	=	92,19%
d. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP	=	84,67%
e. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL	=	100,00%
Realisasi IKU 9 =	$(20\% \times a) + (15\% \times b) + (20\% \times c) + (20\% \times d) + (25\% \times e)$	= 94,81%

Hasil capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa para pegawai belum sepenuhnya berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Kendala pencapaian target IKU 9 tahun 2024 adalah tingkat penyelesaian HP3 pada aplikasi SiAP. Untuk itu, BPK Perwakilan Jawa Tengah berkomitmen memperbaiki pencapaian ini dengan cara:

1. Komunikasi dengan tim pemeriksaan untuk segera menyelesaikan HP3 pada aplikasi SiAP setelah melaksanakan pemeriksaan di lapangan; dan
2. Peningkatan kesadaran pegawai dalam hal kualitas layanan TI maupun sosialisasi kepada seluruh pegawai sebagai user.

Dengan langkah ini, diharapkan pencapaian IKU 9 dapat diperbaiki.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

IKU ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Pengukuran Manajemen Pengetahuan dilihat dari dua unsur, yaitu:

1. **Innovative Practice** (tingkat penyusunan atau penerapan *Best Practise*) yaitu:
 - a. Usulan *Best Practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Satuan kerja dapat mengajukan kembali usulan *best practice* yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya, dengan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update*.
 - b. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit Kerja selain pengusul BP. Satuan kerja yang mengimplementasi BP perlu menyusun laporan atas kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update* atas BP yang diimplementasi.

Pada tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengusulkan **Best Practise “Media Alternatif Pendukung Nota Dinas Kepegawaian BESTIE-MU”** dengan ND Kepala Perwakilan No. 366/ND/XVIII.SMG/11/2024 tanggal 20 November 2024 dan telah disahkan dengan ND No. 908/ND/XII.1/12/2024 tanggal 31 Desember 2024.

2. **Aktivitas Manajemen Pengetahuan** merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Aktivitas manajemen pengetahuan pada tahun 2024 yang sudah dilaksanakan meliputi:

- a. Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2023
- b. Wawancara:
 - 1) Wawancara berbasis Pengetahuan dengan tema Tugas Pokok dan Fungsi Resepsionis di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Wawancara berbasis Pengetahuan dengan tema Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan diklat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

- c. *Blogging*:
 - 1) Empat tulisan dengan tema "Tulisan Konco";
 - 2) Empat tulisan dengan tema "Kenal Konco"
- d. *In House Training* berjudul Pemberian Keterangan Ahli dan Penjaminan Mutu Pemeriksaan; Pemeriksaan LK pada AO NSW: *Lessons Learned*; dan
- e. Mentoring: Bagaimana metodologi yang akan dilaksanakan sesuai dengan SPKN dan Petunjuk Pelaksanaan Kepatuhan?

Perkembangan IKU 10 secara rinci tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.13 Capaian IKU 10

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	150%	100%	101,43%	102,14%	103,72%
Skor kinerja	105	100	101,43	102,14	103,72
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	150%	100%	101,43%	102,14%	103,72%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU 10 tahun 2024 sebesar 103,72% melampaui target yang ditetapkan dan meningkat 1,58% dibanding tahun 2023. Pencapaian target tersebut terlaksana karena:

1. Komitmen pelaksanaan Best Practice berjudul "Media Alternatif Pendukung Nota Dinas Kepegawaian BESTIE-MU"; dan
2. Komitmen para pelaksana kegiatan dalam melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga melakukan efisiensi di antaranya pemanfaatan portal intranet BPK dan aplikasi JASMIN untuk mengunggah usulan BP, serta pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan KTF. Manfaat yang diperoleh adalah penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang serta kemudahan akses bagi satker yang akan mereplikasi BP.

Peningkatan capaian akan semakin baik jika didorong dengan pelaksanaan kegiatan rutin dan strategis antara lain:

1. Peningkatan pemahaman atas *knowledge management* dan BP;
2. Sistem *rewarding* atas usulan BP dari satker yang terpilih menjadi BP level BPK Wide secara lebih memadai;
3. Sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai kegiatan terkait *knowledge management* dan BP yang melibatkan satker di lingkungan BPK; dan
4. Penentuan prioritas kegiatan terkait pembangunan portal *knowledge management* terutama dalam hal kebutuhan penyempurnaan pembangunan portal sebagai sarana/media BP *sharing*.

Pengelola dan pihak-pihak terkait pelaksanaan IS BP *Sharing* diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan BP sesuai dengan *Roadmap* Implementasi Manajemen Pengetahuan BPK yang telah disusun, sehingga pelaksanaan BP di BPK dapat terimplementasi secara menyeluruh.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IKU ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh satker terkait di BPK. Capaian Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi diukur melalui **survei oleh lembaga independen** yang dilaksanakan secara tahunan, dengan sasaran responden eksternal yaitu mitra domestik (IAI, KAP, Perguruan Tinggi, dan media massa), *auditee*, lembaga perwakilan, Instansi Penegak Hukum (IPH) termasuk responden internal yaitu pegawai BPK yang memanfaatkan layanan perpustakaan BPK, baik di kantor pusat maupun di kantor BPK Perwakilan wilayah barat dan timur. Pengukuran dilakukan menggunakan skala sebagai berikut:

1,00 - 1,99	sangat tidak memuaskan
2,00 - 2,99	tidak memuaskan
3,00 - 3,99	memuaskan
4,00 - 5,00	sangat memuaskan

Tabel 3.14 Capaian IKU 11

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Realisasi *)	3,94	4,09	4,26	4,17	4,18
Skor kinerja	103,68	105	105	105	105
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	103,68%	107,63%	112,10%	109,74%	110,00%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi memperoleh nilai 4,18 (skor 105) dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian target ini meningkat 0,01 dibanding tahun 2023.

Target ini tercapai karena adanya pola hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan di antaranya:

1. Kerja sama yang baik dengan entitas pemeriksaan melalui para pemeriksa yang melakukan pemeriksaan di lapangan;
2. Sosialisasi kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melalui kanal media sosial yang dikelola oleh Subbagian Hubungan Masyarakat;
3. Pemenuhan laporan dan kunjungan untuk keperluan akademis; dan
4. Para pelaksana BPK Perwakilan Jawa Tengah menjadi garda terdepan dalam mengenalkan BPK kepada masyarakat luas.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk senantiasa menjaga kepuasan dan pola komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga masyarakat dapat mengenal Badan Pemeriksa Keuangan dengan baik.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU ini bertujuan bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tuisi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Sejak Tahun 2020, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara, antara lain melalui pengalihan pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi daring (*online*) melalui *e-learning* dan *Learning Management System (LMS)*, hingga saat ini dengan adanya Sisdiklat pada BPK Corporate University. Upaya-upaya tersebut memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kediklatan baik dari kualitas layanan sarana prasarana, fasilitator maupun media pembelajaran.

Selain itu juga dilakukan penguatan komitmen dalam menjalin kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi dengan para mitra kerja sama.

Manfaat pelaksanaan diklat secara daring (*online*) antara lain penghematan anggaran untuk perjalanan dinas, belanja barang, penggunaan SDM, dan efisiensi waktu.

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN) dan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)
2. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa

Cut-off perhitungan jumlah pegawai adalah tanggal **30 September**. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Tabel 3.15 Capaian IKU 12

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	97,35%	100%	100%	100%	100%
Skor kinerja	97,35	100	100	105	100
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	97,35%	100%	100%	100%	100%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU 12 tahun 2024 sebesar 100% atau sesuai target yang ditetapkan, yaitu 100%, sehingga skor kinerjanya sebesar 100. Pencapaian ini sama dengan tahun 2023.

Untuk mempertahankan capaian target IKU 12, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara berkala akan melakukan monitoring pemenuhan jam diklat;
2. Mengadakan Diklat Pembekalan bagi para Pemeriksa yang akan melaksanakan Pemeriksaan LKPD; dan
3. Mengikutsertakan diklat secara *daring* atau *self learning* bagi Pemeriksa di luar waktu kegiatan pemeriksaan.

IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek **implementasi Kinerja Anggaran**. Tingkat kinerja atas aspek implementasi adalah evaluasi tingkat kinerja untuk menghasilkan informasi kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai keluaran sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2021, yang diukur dengan empat variabel, yaitu: (1) Penyerapan anggaran (2) Konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan (3) Pencapaian output (4) Efisiensi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi **pelaksanaan anggaran belanja** pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 3.16 Capaian IKU 13

IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,50%	88%	88,50	84,50%**)
Realisasi *)	92,26%	91,21%	90,62%	91,07	92,47%
Skor kinerja	105	104,24	102,98	102,90	105
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	109,18%	107,94%	101,02%	101,53%	109,43%

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

**) perubahan target akibat perubahan metode pengukuran

Realisasi IKU 13 tahun 2024 sebesar 92,47% melampaui target yang ditetapkan sebesar 84,50%, sehingga skor kerjanya sebesar 105. Pencapaian target ini meningkat 1,40% dibanding tahun 2023. Ketercapaian ini didukung oleh komitmen dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, terutama Subbag Keuangan dalam melakukan monitoring atas penyerapan anggaran.

Untuk mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan senantiasa berupaya memonitor anggaran dengan mempertimbangkan aspek penyerapan anggaran, konsistensi kesesuaian penyerapan terhadap perencanaan, fokus pada output serta efisiensi.

C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Strategi 2 Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran, dan sumber daya manusia sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi
 - a. Penggunaan aplikasi BPK di antaranya Jasmin, SiAP LK, dan SiPTL memberikan manfaat efisiensi di antaranya efisiensi anggaran untuk ATK, efisiensi waktu, dan kecepatan pelayanan;
 - b. Penggunaan aplikasi *zoom meeting* untuk melaksanakan komunikasi dengan *stakeholder* atau rapat-rapat internal dapat mengefisienkan anggaran makan dan minum.

2. Pengelolaan BMN,
 - a. Adanya inovasi berupa pemusnahan arsip kelas 4, memberikan manfaat berupa efisiensi penggunaan ruangan arsip;
 - b. Pemanfaatan fitur *file sharing* melalui jaringan internal BPK Perwakilan Jawa Tengah meminimalisir ruang penyimpanan arsip *hardcopy*.
3. Efisiensi Penggunaan Anggaran
 - a. Sisa anggaran pemeriksaan dialihkan untuk perjalanan dinas non pemeriksaan
 - b. Penghapusan anggaran honorarium
4. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka efisiensi SDM, Perwakilan Jawa Tengah sesuai dengan kewenangannya menggunakan pemeriksa di luar BPK (KAP) yang bekerja untuk/dan atas nama BPK. Hal ini berdampak pada optimalnya alokasi pemeriksa untuk tiap entitas pemeriksaan.

D. Perubahan Budaya Kerja

Salah satu kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk mengaplikasikan penerapan nilai-nilai dasar tersebut adalah **Jogo Konco** yaitu saling menjaga antar pegawai maupun antar unit kerja agar IIP terwujud serta saling menghargai dan mendukung profesi sesuai tupoksi masing-masing pegawai maupun antar unit kerja agar tercapainya sinergi, serta **Jateng Produktif** yaitu meningkatkan kerjasama antar pegawai maupun antar unit kerja guna mewujudkan kinerja yang tinggi dengan berpegang teguh pada IIP.

Penerapan IIP saat ini di lingkup Perwakilan Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian penerapan IIP perlu terus dijaga dan ditingkatkan dengan adanya upaya saling dukung dari seluruh pegawai maupun unit kerja terkait. Dalam mewujudkan budaya kerja Jogo Konco dan Jateng Produktif, dibentuk tim pengembangan dan penerapan budaya kerja. Tim ini melakukan sosialisasi budaya kerja di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Langkah-langkah yang dilakukan di antaranya:

1. Kristalisasi motto "**Jogo Konco untuk Jateng Produktif**" menjadi 3 perilaku yaitu Jogo Rogo, Jogo Roso dan Jogo Toto:
 - a. Jogo Rogo: bersama-sama antar elemen pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menjaga kondisi raga/badan yang sehat;
 - b. Jogo Roso: saling bekerja sama memberi suasana positif dan kenyamanan bekerja, sehingga secara psikologis pegawai merasa aman, tenang dan damai sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja; dan
 - c. Jogo Toto: Mempedomani aturan sebagai penjabaran tata tertib sebagai dasar pelaksanaan perilaku seluruh pegawai, baik yang berhubungan dengan perilaku individu maupun perilaku yang berhubungan dengan kedinasan serta norma sosial yang berlaku di masyarakat.
2. Internalisasi Budaya kerja dan nilai-nilai BPK Jateng ke seluruh pegawai.

E. Realisasi Anggaran

Sampai dengan triwulan IV, anggaran yang telah terealisasi untuk mewujudkan kinerja organisasi sebesar Rp52.641.678.147 (99,45%), dengan realisasi keluaran sebanyak 646 keluaran. Secara rinci realisasi anggaran tersaji dalam tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja
Tahun 2024

No	Keluaran	Anggaran	Realisasi			Indikator Kinerja
			Anggaran	Prosentase	Output	
	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian	Rp52.916.734.000	Rp 52.625.980.593	99,45%	646	
	Layanan Perkantoran					
1	Layanan Perkantoran	Rp 29.996.461.000	Rp 29.864.741.024	100%	1	
2	Layanan Sarana Internal	Rp 322.285.000	Rp 320.412.344	99,42%	59	
	Pemeriksaan Keuangan					
1	LHP atas Banparpol pada BPK Perwakilan Jawa Tengah	Rp 534.111.000	Rp 533.111.625	99,81%	316	
2	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Rp 7.080.000	Rp6.997.700	98,84%	1	
3	Sumbangan IHPS Perwakilan	Rp 89.092.000	Rp 89.071.537	99,98%	2	
4	Laporan Profil Entitas Perwakilan	Rp 13.760.000	Rp13.730.500	99,79%	36	
5	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rp 638.581.000	Rp637.490.400	99,83%	72	IKU 3
6	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan Jawa Tengah	Rp 194.920.000	Rp187.220.000	96,05%	72	IKU 3
7	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Rp 1.657.641.000	Rp 1.563.375.743	94,31%	12	IKU 5
8	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Rp 1.541.019.000	Rp 1.534.127.368	99,55%	21	
9	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah FAF.U21	Rp 17.921.784.000	Rp 17.875.702.352	99,74%	54	IKU 1 IKU 2 IKU 4 IKU 6

F. Inovasi

Inovasi yang dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan telah menjadi *Best Practice*:

1. Tahun 2023 adalah “Manajemen Integrasi Kalender Akun bpk.go.id”

Hasil pelaksanaan inovasi adalah sebagai berikut:

- a. Informasi jadwal dan agenda kerja selalu *update* dan *realtime*.
- b. Koordinasi menjadi lebih cepat karena menggunakan fitur yang sama.

Sebelum menggunakan agenda yang terintegrasi, informasi atas jadwal acara di kantor Perwakilan masih berada di unit kerja masing-masing, sehingga menyulitkan koordinasi. Setelah menggunakan integrasi kalender, jadwal kegiatan lebih terorganisir dan mempermudah koordinasi antar unit kerja dan tamu.

- c. Dapat dipantau oleh semua pihak
Bagi internal pegawai, kegiatan dapat dipantau melalui gawai masing-masing; bagi tamu eksternal, dapat melihat agenda yang akan/sedang berlangsung melalui layar TV yang terpasang di Lobby kantor perwakilan.
2. Tahun 2024 adalah “**Media Alternatif Pendukung Nota Dinas Kepegawaian BESTIE-MU**”
Hasil pelaksanaan inovasi adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat peningkatan komunikasi yang dilakukan pegawai Subbagian SDM melalui penggunaan media Bestie-mu;
 - b. Kemudahan pengelolaan informasi kepegawaian melalui media alternatif Bestie-mu; dan
 - c. Perbaikan media komunikasi yang cepat diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti, serta menarik berdasarkan persepsi manfaat yang dirasakan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terhadap media Bestie-mu.

G. Penghargaan

Penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Perwakilan Jawa Tengah selama tahun 2024 yaitu:

1. Peringkat 1 SDM Award, kategori Pemanfaatan Aplikasi Kepegawaian;
2. Peringkat 1 SDM Award, kategori Pengelolaan SKP;
3. Peringkat III SDM Award, kategori Pemutakhiran Data Mandiri;
4. Terbaik I, Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan;
5. Peringkat II, Penghargaan UJDIH Penyusun Tulisan Hukum Terbaik;
6. Peringkat I, Penghargaan Foto Pemeriksaan *Stunting*;
7. Terbaik II, Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2022 Lingkup Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Penghargaan Adi Kirtya Arthasantosha, kategori Satker Perwakilan Terbaik tahun 2023; dan
9. Penghargaan sebagai Pengelola UJDIH BPK Perwakilan Terbaik.

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bentuk pertanggungjawaban untuk memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja tingkat organisasi dan seluruh unit kerja yang telah mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara lain melalui identifikasi risiko yang menghambat pencapaian target kinerja dan upaya penanganannya.

Pelaksanaan manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin dan strategis untuk mendukung keberhasilan dan mengatasi hambatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang dioperasionalkan melalui pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan, dari 13 indikator IKU, 11 indikator telah mencapai target sehingga memperoleh Skor Kinerja sebesar **101,25**. Skor ini meningkat 0,02 dari tahun sebelumnya. Secara ringkas tersaji pada tabel berikut:

NAMA IKU		SETELAH VALIDASI (HASIL KOREKSI)		SKOR	CATATAN
		Target	Realisasi		
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	96,33%	96,33	Tidak terpenuhi
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100	Terpenuhi
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	94,75%	105	Penyesuaian dengan data IHP Semester I Tahun 2024
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,03%	101,03	Terpenuhi
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100,00%	100	Terpenuhi
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101,20%	101,20	Terpenuhi
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,81	4,93	102,49	Terpenuhi (perubahan target karena hasil evaluasi IKU)
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	90,05	90,50	100,50	Terpenuhi
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	94,81%	96,74	Tidak terpenuhi (SiAP)
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	103,72%	103,72	Terpenuhi
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,18	105	Terpenuhi
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100	Terpenuhi
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%	92,47%	105	Terpenuhi (Perubahan target karena perubahan formula penghitungan)

Untuk menyempurnakan skor kinerja di tahun-tahun mendatang, diperlukan evaluasi dan perbaikan di antaranya:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Hasil pemeriksaan dengan cara mengoptimalkan pemenuhan QA dan QC pemeriksaan secara berjenjang;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) sebagai dokumentasi tahapan pemeriksaan ;
3. kerja sama dan koordinasi yang baik dalam memantau pemanfaatan TI

Laporan Kinerja Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja dalam membantu pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

Semarang, 31 Januari 2025

Manajer IKU



Bagus Kurniawan
NIP 197710131999111001

Mengetahui,
Kepala Perwakilan



Karyadi
NIP 197111291998031002

PENGHITUNGAN PRISMA TRIWULAN IV TAHUN 2024

- ▾ Badan Pemeriksa Keuangan
 - Auditorat Utama Keuangan Negara I
 - Auditorat Utama Keuangan Negara II
 - Auditorat Utama Keuangan Negara III
 - Auditorat Utama Keuangan Negara IV
 - ▾ Auditorat Utama Keuangan Negara V
 - ▢ Sekretariat AKN V
 - ▢ Auditorat V.A
 - ▢ Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan
 - ▢ BPK Perwakilan Provinsi Aceh
 - ▢ BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
 - ▢ BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
 - ▢ BPK Perwakilan Provinsi Riau
 - ▢ BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
 - ▢ BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
 - ▢ BPK Perwakilan Provinsi Jambi
 - ▢ BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - ▢ BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
 - ▢ BPK Perwakilan Provinsi Lampung
 - ▢ BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
 - ▢ BPK Perwakilan Provinsi Banten
 - ▢ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
 - ▢ BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

PERIODE: DES / TW 4 / SEM 2 / TAHUN / 2024

[Perjanjian Kinerja / Peta Strategi](#) |
 [Detail Scorecard](#) |
 [Indikator Kinerja Keluaran \(IKK\)](#)

Expand Refresh Calculate Export Edit Detail & Dokumen						
Nama	Jenis	Periode	Target PK	Target	Realisasi	Score
▾ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Scorecard	Triwulan...				101.25 ●
▾ Sasaran Kegiatan. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Sasaran Strategis	Triwulan...				101.25 ●
▸ IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	96,33 %	96,33 ●
▸ IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
▸ IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	75,00%	75,00%	94,75 %	105 ●
▸ IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	101,03 %	101,03 ●
▸ IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
▸ IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	101,20 %	101,2 ●
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	IKU	Tahunan	4,81	4,81	4,93	102,49 ●
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	IKU	Triwulan...	90,05	90,05	90,50	100,5 ●
▸ IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	IKU	Triwulan...	98,00%	98,00%	94,81 %	96,74 ●
▸ IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	103,72 %	103,72 ●
IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	IKU	Tahunan	3,80	3,80	4,18	105 ●
▸ IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	IKU	Bulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
▸ IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran	IKU	Triwulan...	84,50%	84,50%	92,47 %	105 ●